

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan Rahmat & Inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “HUBUNGAN NEGARA & AGAMA”.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini kami masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini sangat kami harapkan.

Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami maupun para pembaca sekalian.

Jombang, Desember 2010

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN DEPAN .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I : PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang .....

B.           Tujuan Pembahasan .....

BAB II. HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA

BABA III . PENUTUP

          A. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kewarganegaraan adalah ilmu yang membahas hubungan antara warganegaranya dengan Negara. Dan diantara beberapa sub bahasanya disini kami akan membahas sedikit tentang hubungan Negara dan agama yang sudah atau yang sedang terjadi pada masa ini.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kedudukan agama di Negara ini tidak diakui keberadaannya. Misalnya menurut sosialisme, hubungan antara Agama dan Negara diistilahkan sebagai hubunganb yang negatif. Menurut sekularisme peranan agama di Negara ini dibatasi. Menurut Kapitalisme agama harus dipisahkan dari area kehidupan manusia. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hubungan Negara dan Agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling membutuhkan. Dan yang berpendapat ini adalah Aqidah Islamiyah

### **B. TUJUAN PEMBAHASAN**

Kami memilih pembhasan “ HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA” adalah bertujuan agar para pembaca mengerti dan faham bagaimana sesungguhnya hubungan Negara dan Agama yang terjadi pada saat ini.

## **BAB II**

### **HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA**

Tinjauan hubungan agama-negara ?secara ideologis? pertama-tama harus diletakkan

pada proporsinya dengan benar. Yaitu sebagai pemikiran cabang tentang kehidupan, yang lahir dari pemikiran mendasar tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan (aqidah). Oleh sebab itu, pembahasan hubungan agama-negara pertama-tama harus bertolak dari pemikiran mendasar tersebut, baru kemudian dibahas hubungan agama-negara, sebagai pemikiran cabang yang lahir dari pemikiran mendasar tersebut. Yang dimaksud pemikiran mendasar tersebut (aqidah), adalah pemikiran menyeluruh (fikrah kulliyyah) tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta tentang apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudah kehidupan dunia, serta hubungan kehidupan dunia dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudahnya (An Nabhani, Nizham Al-Islam, 2002).

Mengingat kini ideologi yang ada di dunia ada 3 (tiga), yaitu Sosialisme (Isytirakiyyah), Kapitalisme (Ra`sumaliyyah), dan Islam, maka aqidah atau pemikiran mendasar tentang kehidupan pun setidaknya ada 3 (tiga) macam pula, yakni aqidah Sosialisme, aqidah Kapitalisme, dan aqidah Islamiyah. Masing-masing aqidah ini merupakan pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pelbagai pemikiran cabang tentang kehidupan, termasuk di antaranya hubungan agama-negara.]

#### **Relasi Agama-Negara Menurut Sosialisme, Kapitalisme, Dan Islam**

Aqidah Sosialisme adalah Materialisme (Al Maaddiyah), yang menyatakan bahwa dunia ini tiada lain terdiri dari dan tergantung eksistensinya pada benda material. Menurut Donald Wilhelm dalam *Creative Alternatives to Communism Guide Lines for Tomorrow's World* (1979:147), "Materialisme, in its philosophical sense, is the view that all that exist is matter or is wholly dependent upon the matter for its existence." Jadi, segala sesuatu yang ada hanyalah materi belaka. Materilah asal usul segala sesuatu. Materi merupakan dasar eksistensi segala macam pemikiran. Maka, tidak ada tuhan, tidak ada ruh, atau aspek-aspek kegaiban lainnya, karena semuanya tidak dapat diindera seperti materi. Dari ide

materialisme inilah dibangun 2 (dua) ide pokok dalam Sosialisme yang mendasari seluruh bangunan ideologi Sosialisme, yaitu Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis (Ghanim Abduh, Naqdh Al Isytirakiyyah Al Marksiyyah, 1964).

Atas dasar ide materialisme itu, dengan sendirinya agama tidak mempunyai tempat dalam Sosialisme. Sebab agama berpangkal pada pengakuan akan eksistensi tuhan, yang jelas-jelas diingkari oleh ide materialisme. Bahkan agama dalam pandangan kaum sosialis hanyalah ciptaan manusia yang tertindas dan merupakan candu yang membius rakyat yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Karl Marx (1818-1883) berkata, "Religion is the sigh of the oppressed people, the heart of heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people [Agama adalah keluh kesah rakyat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari suatu situasi yang tak berjiwa. Agama adalah candu bagi rakyat].?" (Lihat Karl Heinrich Marx, *Contributon to the Critique of Hegel's Philosophi of Right*, dalam *On Religion*, (1957): 41 - 42).

Dengan demikian, menurut Sosialisme, hubungannya dapat diistilahkan sebagai hubungan yang negatif, dalam arti Sosialisme telah menafikan secara mutlak eksistensi dan pengaruh agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agama merupakan candu masyarakat yang harus dibuang dan dienyahkan.

Aqidah ideologi Kapitalisme, adalah pemisahan agama dari kehidupan (fashluddin "anil hayah), atau sekularisme. Dalam Webster Dictionary sekularisme didefinisikan sebagai: "A system of doctrines and practices that rejects any form of religious faith and worship" [Sebuah sistem doktrin dan praktik yang menolak bentuk apa pun dari keimanan dan upacara ritual keagamaan], atau sebagai: "The belief that religion and ecclesiastical affairs should not enter into the function of the state especially into public education." [Sebuah kepercayaan bahwa agama dan ajaran-ajaran gereja tidak boleh memasuki fungsi negara, khususnya dalam pendidikan publik].

Jadi, sekularisme tidak menafikan agama secara mutlak, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Keberadaan agama memang diakui "walaupun hanya secara formalitas" namun agama tidak boleh mengatur segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang menjadi urusan pemerintah (Robert Audi, *Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal*, 2002:62). Agama hanya mengatur hubungan pribadi manusia

dengan tuhanNya, sedang hubungan manusia satu sama lain diatur oleh manusia itu sendiri (Zallum, Ad Dimuqrathiyah Nizham Kufur, 1990).

Berdasarkan aqidah Kapitalisme, formulasi hubungan agama-negara dapat disebut sebagai hubungan yang separatif, yaitu suatu pandangan yang berusaha memisahkan agama dari arena kehidupan. Agama hanya berlaku dalam hubungan secara individual dalam wilayah privat antara manusia dan tuhanNya, atau berlaku secara amat terbatas dalam interaksi sosial sesama manusia. Agama tidak terwujud secara institusional dalam konstitusi atau perundangan negara, namun hanya terwujud dalam etika dan moral individu-individu pelaku politik.

Aqidah Islamiyah adalah iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, dan Qadar (taqdir) Allah. Aqidah ini merupakan dasar ideologi Islam yang darinya terlahir berbagai pemikiran dan hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia. Aqidah Islamiyah telah memerintahkan untuk menerapkan agama secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya negara. Firman Allah SWT :

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan” (Qs. al-Baqarah [2]: 208).

“Apakah kamu akan beriman kepada sebagian Al Kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya. Maka tidak adabalasan bagi yang mengerjakan itu di antara kamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada Hari Kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih” (Qs. al-Baqarah [2]: 85).

Berdasarkan ini, maka seluruh hukum-hukum Islam tanpa kecuali harus diterapkan kepada manusia, sebagai konsekuensi adanya iman atau Aqidah Islamiyah. Dan karena hukum-hukum Islam ini tidak dapat diterapkan secara sempurna kecuali dengan adanya sebuah institusi negara, maka keberadaan negara dalam Islam adalah suatu keniscayaan. Karena itu, formulasi hubungan agama-negara dalam pandangan Islam dapat diistilahkan sebagai hubungan yang positif, dalam arti bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa negara adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama. Agama tak dapat dipisahkan dari negara.

Agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam

konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maka dari itu, tak heran banyak pendapat para ulama dan cendekiawan Islam yang menegaskan bahwa agama-negara adalah sesuatu yang tak mungkin terpisahkan. Keduanya ibarat dua keping mata uang, atau bagaikan dua saudara kembar (tau'amaani). Jika dipisah, hancurlah perikehidupan manusia.

Imam Al Ghazali dalam kitabnya Al Iqtishad fil I'tiqad halaman 199 berkata:

Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.

Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, juz 28 halaman 394 telah menyatakan:

Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.

Sejalan dengan prinsip Islam bahwa agama dan negara itu tak mungkin dipisahkan, juga tak mengherankan bila kita dapati bahwa Islam telah mewajibkan umatnya untuk mendirikan negara sebagai sarana untuk menjalankan agama secara sempurna. Negara itulah yang terkenal dengan sebutan Khilafah atau Imamah. Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Hukmi fil Islam, hal. 17 mendefinisikan Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Seluruh imam madzhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah, juz V, halaman 308:

Para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) --rahimahumullah--

telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahwa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya...

Tak hanya kalangan empat madzhab dalam Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah <sup>3</sup>/<sub>4</sub>juga termasuk

Khawarij dan Mu'tazilah<sup>3/4</sup> tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah.

Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar, jilid VIII, halaman 265 mengatakan:

Menurut golongan Syi'ah, mayoritas Mu'tazilah dan Asy'ariyah, [Khilafah] adalah wajib menurut syara'.

Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa' Wan Nihal, juz IV, halaman 87 mengatakan:

Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji'ah, seluruh Syi'ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah)

## **Kesimpulan**

Hubungan agama-negara dalam pandangan Islam harus didasarkan pada Aqidah Islamiyah, bukan aqidah yang lain. Aqidah Islamiyah telah memerintahkan penerapan agama secara menyeluruh, yang sangat membutuhkan eksistensi negara.

Jadi, hubungan agama dan negara sangatlah eratnya, karena agama (Islam) tanpa negara tak akan dapat terwujud secara sempurna dalam kehidupan.

Hubungan ini secara nyata akan dapat diwujudkan jika berdiri negara Khilafah Islamiyah, yang pendiriannya merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin. Tanpa Khilafah, agama dan negara akan terpisah dan terceraiikan, yang pada gilirannya akan mengakibatkan lenyapnya penerapan sebagian besar ajaran Islam. Dalam keadaan tanpa Khilafah, menerapkan Islam secara sempurna dan menyeluruh adalah utopia, ibarat mimpi di siang bolong.

Agama di negeri ini diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun disebutkan bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, tetapi pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Sejak lahir, pemerintah negeri ini menunjuk satu departemen tersendiri yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada, yaitu Departemen Agama.

Pemerintah juga memberikan anggaran melalui APBN sebagaimana pada departemen lainnya. Dahulu, pada masa orde baru, Departemen Agama dikenal sebagai instansi pemerintah yang paling cekak anggarannya. Kantor-kantor instansi pemerintah, termasuk lembaga pendidikan yang berada di bawah departemen ini dikenal tampak

sederhana dan bahkan tampak kusam, karena kekurangan anggaran. Tetapi akhir-akhir ini sudah menampakkan wajah yang cukup cerah. Anggaran Departemen Agama, masuk



kategori papan atas.

Tugas Departemen Agama, sebagaimana nama yang disandangnya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan kehidupan umat beragama. Tugas ini cakupannya jika dirinci cukup luas, mulai dari merumuskan kebijakan nasional di bidang keagamaan, melaksanakan pembinaan dan pelayanan, termasuk pembinaan kerukunan umat beragama.

Yang tampak menonjol, dalam membina umat beragama selain melalui tempat-tempat ibadah, adalah melalui pendidikan agama.

Dalam melaksanakan kebijakannya, Departemen Agama memiliki beberapa direktorat jendral sesuai dengan jenis tugas dan agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sementara ini, ada dirjen pendidikan Islam, dirjen haji, dirjen pembinaan masyarakat Islam, dirjen pembinaan agama kristen Kantholik, dirjen pembinaan agama kristen protestan, dirjen pembinaan agama Hidndu, dirjen agama budha. Agama Kong Hu Cu, sementara masih berada di bawah Sekretaris Jendral Departemen Agama.

Sebagaimana disinggung di muka, masing-masing agama mengelola lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh tanah air, mulai dari pendidikan yang bersifat formal, maupun yang bersifat non formal dan informal. Pendidikan yang bersifat formal misalnya, masing-masing agama memiliki lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di antaranya ada yang berstatus negeri dan sebagian lainnya, bahkan justru yang lebih banyak jumlahnya, berstatus swasta.

Semula lembaga pendidikan formal yang berada di bawah pembinaan departemen agama hanya bersifat pendidikan kedinasan, yaitu lembaga pendidikan yang dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan tenaga yang diperlukan oleh departemennya sendiri, sehingga bidang-bidang yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan instansi itu. Akan tetapi akhir-akhir ini, lembaga pendidikan yang berada di bawah departemen agama, ternyata berkembang lebih luas lagi melampaui wilayahnya semula, hingga akhirnya orientasinya menjadi sama dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Dengan mengelola pendidikan hingga dalam jumlah yang besar ini, maka Departemen Agama mendapatkan anggaran yang cukup besar. Menurut catatan, departemen agama mengelola lembaga pendidikan tidak kurang dari 20 % dari keseluruhan jumlah lembaga pendidikan yang ada di tanah air ini. Anggaran itu, selain digunakan untuk membiayai operasional pembinaan keagamaan masing-masing agama, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di masing-masing direktorat jendral pembinaan agama yang berbeda-beda itu.

Saya selama ini merasakan, betapa indahnya sesungguhnya negeri ini, jika dilihat dari aspek agama. Agama diurus dan disediakan anggaran oleh pemerintah. Pemerintah atau negara tidak saja memberikan perhatian, melainkan juga ikut serta membiayai dan membina kehidupan umat beragama dari berbagai agama yang ada. Oleh karena itu, hubungan negara dan agama di negeri ini, sulit dilihat sebagai dua bagian yang berbeda.

Agama dan negara tampak menyatu secara padu. Nilai-nilai agama, seperti konsep tentang ketaqwaan, keimanan, kejujuran, keadilan, kebersamaan, musyawarah dan seterusnya masuk pada relung-relung kehidupan bernegara. Lebih dari itu, di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, kantor-kantor pemerintah termasuk lembaga pendidikan, disediakan tempat ibadah. Setiap kantor pemerintah dilengkapi masjid, termasuk juga sekolah-sekolah pemerintah dan juga perguruan tinggi atau universitas.

Lebih dari itu, pelaksanaan ritual agama pun mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Seperti misalnya penyelenggaraan ibadah haji, puasa di bulan ramadhan, pemerintah ambil bagian dalam penentuan awal dan akhir bulan ramadhan. Demikian pula pada peringatan hari besar keagamaan, semua agama, dijadikan sebagai hari libur nasional. Lebih dari itu, simbol keagamaan misalnya mulai dari yang paling sederhana, bahwa hampir setiap pejabat pemerintah tatkala memulai pidato memberikan nuansa agama, misalnya mengucapkan salam dan memuji Tuhan, dengan menggunakan cara Islam bagi pejabat muslim, dan begitu pula bagi agama lainnya Ayat-ayat suci al Qur'an banyak disitir atau dijadikan referensi dalam berbagai pidato oleh para pejabat pemerintah.

Memang dalam beberapa hal, ada sementara pihak menuntut lebih dari itu. Misalnya, agar hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum positif. Usulan ini selain didasarkan atas pertimbangan bahwa kaum muslimin merupakan mayoritas penduduk negeri ini, juga dijamin bahwa jika usulan itu disetujui maka pemeluk agama lain tetap akan terlindungi. Hal itu sangat dimungkinkan, kerana hukum Islam sesungguhnya akan melindungi siapapun, termasuk bagi mereka yang memeluk agama lain. Begitu pula, muncul isu di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama nasrani, mengajukan tuntutan serupa.

Aspirasi tersebut sampai saat ini belum mendapatkan respon. Keinginan itu agaknya sulit dipenuhi atas dasar pandangan bahwa negeri ini bukan berdasar agama, melainkan Pancasila dan UUD 1945. Agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi agama diposisikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-

hari. Namun nilai-nilai universal agama, seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati sesama, kasih sayang, kebersamaan, bermusyawarah, dan lain-lain dijadikan sebagai

sumber atau ruh dalam menyusun berbagai aturan, pedoman, dan bahkan undang-undang negara.

Hubungan agama dan negara seperti ini sesungguhnya juga belum final. Semua sedang berada pada proses yang sedang dan tetap akan berjalan. Akan tetapi, saya melihat bahwa proses itu semakin lama semakin mendekat. Saya melihat, pada saat ini orang tidak mempersoalkan lagi tentang kegiatan yang berbau keagamaan dan justru sebaliknya selalu mendapat dukungan. Pejabat dan siapapun di negeri ini meletakkan agama pada posisi yang sangat strategis. Sudah tidak pernah ada lagi pejabat pemerintah yang menganggap bahwa agama sebagai penghambat kemajuan atau modernisasi. Bahwa agama justru menjadi penting. Agama diposisikan sebagai sumber nilai, motivasi dan lebih dari itu adalah sebagai pegangan hidup. Tidak pernah ada, bahkan pada akhir-akhir ini yang sengaja atau tidak, mendegradasikan makna agama dalam kehidupan secara keseluruhan. Kita melihat misalnya, tatkala para cawapres dalam forum kampanyenya ditanya oleh moderator tentang posisi agama dalam kaitannya dengan negara, semuanya meletakkan agama pada posisi yang amat strategis. Agama dipandang sebagai sumber nilai dalam semua kegiatan bermasyarakat dan bernegara.

Akhirnya, saya membayangkan jika proses hubungan agama dan negara di negeri ini terus berkembang sebagaimana yang berjalan selama ini, maka Indonesia tidak saja akan menjadi negara yang paling besar berpenduduk muslim, tetapi lebih dari itu, juga sekaligus sebagai model ideal hubungan antara agama dan negara bagi masyarakat yang berdemokrasi. Dalam suasana seperti itu, maka penyebaran, misi, atau dakwah masing-masing agama, dalam suasana yang terbuka, akan menawarkan atau mengedepankan kualitas kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai masing-masing agama, dan bukan selainnya itu. Orang mengenali keunggulan dan keluhuran suatu agama, bukan saja berdasar pada tataran kekuatan doktrin dari kitab suci masing-masing, melainkan juga dari kualitas kehidupan secara menyeluruh yang berhasil ditampilkan oleh masing-masing pemeluk agama yang berbeda-beda itu. Sehingga kemudian yang terjadi, adalah mereka akan berlomba-lomba dalam menampilkan kualitas kehidupan dan bukan justru saling mengingkari keberadaannya dan atau merendahkan. Wallahu a'lam.

### **BAB III PENUTUP**

Ada beberapa pendapat mengenai hubungan Negara dan Agama ini :

### 1. Menurut Sosialisme

Hubungan Negara Agama dapat diistilahkan sebagai hubungan yang negative, dalam arti sosialisme telah menafikan secara mutlak eksistensi dan pengaruh agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena menurutnya agama merupakan candu masyarakat yang harus dimusnahkan.

### 2. Menurut Sekularisme

Sekularisme tidak menafikan agama secara mutlak, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Disini keberadaan agama memang diakui, namun tidak boleh mengatur segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Yang menjadi urusan pemerintah agama hanyalah bertugas mengatur pribadi manusia dengan Tuhan.

### 3. Menurut Kapitalisme

Menurutnya hubungan Negara Agama disebut sebagai hubungan yang separatif, yaitu suatu pandangan yang berusaha memisahkan agama dari area kehidupan, agama hanya berlaku dalam hubungan secara individu antara manusia dengan tuhan.

### 4. Menurut Islamiyah

Aqidah islamiyah telah memerintahkan untuk menerapkan agama secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya Negara.

Berdasarkan ini, maka seluruh hukum-hukum islam tanpa kecuali harus diterapkan kepada manusia, sebagai konsekuensi adanya iman atau aqidah islamiyah. Dengan demikian formulasi hubungan Negara Agama dalam pandangan islam dapat diistilahkan sebagai hubungan yang positif dalam arti bahwa agama membutuhkan Negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa Negara adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama.

Pendapat lain menyatakan bahwa agama di Negeri ini diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun disebutkan bahwa Indonesia bukan sebagai Negara yang berdasar agama, tetapi pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Sejak lahir pemerintah di negeri ini menunjuk

Departemen Agama tersendiri yang bertugas melakukan Pembinaan & Pelayanan terhadap semua agama yang ada, yaitu Departemen Agama.

Dalam melakukan kebijakannya, Departemen Agama memiliki beberapa Direktorat Jenderal sesuai dengan jenis tugas & agama yang hidup & berkembang di Indonesia. Sementara ini ada Dirjen Pendidikan Islam, dirjen haji, Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam, Dirjen Pembinaan Masyarakat Kristen Katolik/Protestan, Dirjen Pembinaan Agama Hindu, Dirjen Pembinaan Agama Budha, Agama Kong Hu Cu, sementara masih berada dibawah sekretaris Jendral Departemen Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://hayatulislam.net/>

[http// www.vin-malang.ac.id](http://www.vin-malang.ac.id)